

**Pengaruh Aktor Lokal Dominan dalam Pengelolaan Keuangan Desa*****The Influence of Dominant Local Actors in Villages Financial Management***Hanifah Firda Fauzia Gunadi<sup>1,\*</sup>, Sofyan Sjaf<sup>1,\*</sup>, Lala M. Kolopaking<sup>1,\*</sup>)<sup>1</sup>Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia<sup>\*</sup>E-mail korespondensi: [hanifah\\_gunadi3795@apps.ipb.ac.id](mailto:hanifah_gunadi3795@apps.ipb.ac.id); [sofiansjaf@apps.ipb.ac.id](mailto:sofiansjaf@apps.ipb.ac.id); [lalakolopaking@gmail.com](mailto:lalakolopaking@gmail.com)**ABSTRACT**

*Based on a sociological perspective, problems in a village financial management are not only administrative but also structural, which is an intervention from the government, so that access to the village financial management is only owned by a handful of people. It has implications for the community participation space, so the village development is not in accordance with the real hopes and needs of the village community. This study aims to identify local people who control the village financial management and measure the influence index of these actors in carrying out their respective roles in Purwabakti Village (rural) and Sukadamai Village (semi-urban) in Bogor Regency. The research was conducted using mixed methods. The results showed that there were six dominant local actors in the village financial management. Five of them are village government officials. The educational backgrounds and experiences of actors in different villages influence their actions and strategies to gain community support and maintain their position in the arena. Institutional capital and economic capital are the highest capital used by actors in the village – village type, while moral capital is the highest capital used by actors in the rural-urban type village.*

**Keywords:** actor's action, actor's capital, domination, local actor, village financial management

**ABSTRAK**

*Berdasarkan perspektif sosiologis, kendala dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya bersifat administratif melainkan bersifat struktural berupa intervensi pemerintah melalui kebijakan sehingga akses terhadap pengelolaan keuangan desa hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Hal ini menyebabkan efektivitas pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada tindakan dan integritas aktor dalam menjalankan peran strukturalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para aktor lokal yang mendominasi arena pengelolaan keuangan desa dan mengukur indeks pengaruh para aktor tersebut dalam menjalankan perannya dalam arena ini di Desa Purwabakti (tipe “desa-desa”) dan Desa Sukadamai (tipe “desa-kota”), Kabupaten Bogor. Penelitian yang mendasari tulisan ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa. Lima di antaranya adalah aparatur pemerintahan desa. Latar belakang pendidikan dan pengalaman aktor di desa yang berbeda memengaruhi tindakan dan strategi aktor untuk memperoleh dukungan masyarakat dan menjaga posisi mereka dalam arena pengelolaan keuangan desa. Modal institusi dan modal ekonomi menjadi modal tertinggi yang digunakan aktor di desa tipe “desa-desa”, sedangkan modal moral menjadi modal tertinggi yang digunakan aktor di desa tipe “desa-kota”.*

**Keywords:** aktor lokal, dominasi, modal aktor, pengelolaan keuangan desa, tindakan aktor



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan satu proses penting yang menentukan tercapainya tujuan pembangunan desa. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan pengelolaan keuangan desa masih belum efektif. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat kendala penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam “Buku Pintar Dana Desa”, di antaranya adalah: (1) penggunaan di luar bidang prioritas, (2) pengeluaran tidak didukung bukti, (3) pekerjaan oleh pihak ketiga, (4) pajak tidak sesuai ketentuan, (5) desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, dan (6) belanja di luar anggaran. Kendala-kendala tersebut disebabkan oleh sebagian besar sumber daya manusia, dalam hal ini perangkat desa yang mengelola dana, belum memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai dalam bidang tersebut (Meutia & Liliana, 2017). Studi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Thomas (2013) memberikan hasil bahwa rendahnya kapasitas aparat desa dan rendahnya intensitas koordinasi terkait pengelolaan ADD antara pemerintah desa dan pemerintah pusat merupakan hambatan dalam proses pengelolaan ADD di desa lokasi penelitiannya, yaitu Desa Sebangang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas SDM di desa, selain dengan melakukan bimbingan teknis, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa sebagai dasar penugasan kepada seseorang yang ditunjuk dan memenuhi kriteria untuk mendampingi desa. Namun, pada pelaksanaannya di beberapa desa di Jawa Timur, tenaga pendamping desa tidak memiliki kemampuan dan keahlian terkait pengelolaan Dana Desa sehingga pendamping desa tersebut justru menjadi beban desa (Triani & Handayani, 2018).

Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya bersifat administratif yang disebabkan oleh kapasitas sumber daya masyarakat (SDM) di desa, melainkan juga kendala yang bersifat struktural berupa intervensi pemerintah melalui kebijakan dan peranannya dalam mengatur pengelolaan keuangan desa yang menyebabkan ruang partisipasi bagi masyarakat semakin sempit. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya peraturan pemerintah yang telah memberikan arahan mengenai pembentukan tim khusus dalam pengelolaan keuangan desa sejak dari tahap perencanaan berupa kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) hingga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Proses ini didominasi oleh aparat pemerintah desa dan elit lokal saja sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah. Sjaf (2019a) juga menyampaikan bahwa berkas administrasi yang harus segera disiapkan untuk penyaluran dana menyebabkan RPJM Desa dan RKP Desa disusun oleh segelintir orang saja, tidak partisipatif, bahkan menggunakan jasa konsultan yang tidak mengetahui harapan dan kebutuhan warga desa yang sebenarnya. Selain itu, pergeseran pola penyaluran dana dari pemerintah pusat—yang tadinya bertahap melalui pemerintah daerah berubah menjadi langsung ditransfer ke pemerintah desa—menyebabkan hanya aktor-aktor tertentu saja yang memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan desa. Padahal, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberikan manfaat yang lebih berarti bagi masyarakat dalam rangka mencapai keberhasilan program pembangunan desa.

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa pada tahun 2016-2017 terdapat sedikitnya 110 kasus korupsi anggaran desa yang melibatkan 107 kepala desa, 30 aparat pemerintah desa dan 2 istri kepala desa. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa serta dibatasinya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif dalam pengelolaan dana desa.<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan kajiannya terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun 2015 menyatakan bahwa salah satu potensi masalah dalam pengelolaan keuangan desa adalah pengawasan yang rendah dan saluran pengaduan masyarakat yang tidak optimal.<sup>2</sup> Berdasarkan hasil studinya, Tumbel (2017) juga menyatakan bahwa penggunaan dan pengelolaan keuangan desa yang sedikit melibatkan masyarakat berdampak pada kecilnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana desa. Pelibatan sedikit masyarakat memungkinkan pengelolaan keuangan desa hanya didominasi pihak-pihak tertentu saja.

---

<sup>1</sup> Siaran pers hasil kajian ICW. Sumber: <https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>

<sup>2</sup> Laporan kajian pengelolaan ADD dan DD. Sumber: <https://acch.kpk.go.id/component/bdthemes/shortcodes>

Bourdieu menyatakan bahwa aktor menempati suatu lingkungan yang akan mempersiapkan bagi aktor tersebut strategi yang dapat digunakan untuk kedudukan tertentu. Lingkungan atau arena menjadi tempat di mana aktor bertindak berdasarkan dialektika struktur yang objektif dan keagenan serta fenomena subjektif (Ritzer & Goodman, 2007). Fenomena subjektif yang dimaksud dapat berupa pengetahuan, pengalaman, latar belakang yang kemudian membentuk tindakan aktor. Oleh karena itu, aktor dengan latar belakang, pengalaman dan motivasi diri yang berbeda akan memiliki tindakan yang berbeda juga. Berdasarkan hasil studinya terhadap masyarakat multietnik, Bumulo et al. (2018) menyebutkan bahwa setiap etnik memiliki cara pandang yang berbeda dalam memaknai lahan pertanian. Perbedaan pemaknaan ini menentukan kepentingan lahan bagi setiap etnik yang akan mendorong untuk menguasai lahan pertanian tersebut. Sjaif (2017) dalam tulisannya mengenai politik etnik di Makassar juga menyebutkan bahwa relasi antar etnis ditentukan oleh sejarah etnisitas, struktur demografi etnik dan dinamika politik etnik lokal berbasis etnik. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada struktur politik dan ekonomi dalam kerangka politik etnik.

Berdasarkan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini dilakukan di dua desa dengan karakteristik yang berbeda. Desa Purwabakti memiliki ciri-ciri yang mendekati karakteristik tipe “desa-desa” (masyarakat lebih tertutup) karena lokasinya yang jauh dari pusat kota sehingga lebih sedikit berinteraksi dengan pihak luar desa. Sedangkan Desa Sukadamai memiliki ciri-ciri yang mendekati karakteristik tipe “desa-kota” (masyarakat lebih terbuka) karena lokasinya yang mendekati wilayah kota dan perguruan tinggi sehingga masyarakatnya lebih sering berinteraksi dengan pihak luar desa yang cenderung heterogen. Perbedaan ini tentu akan memengaruhi pengalaman aktor-aktor yang berada di kedua desa dan pada akhirnya berdampak pada tindakan sosial yang dilakukan aktor.

Dalam tulisan ini, pengelolaan keuangan desa merupakan arena dimaksud yang menjadi ajang pertarungan antar aktor di desa. Anheir, Gerhards dan Romo menyatakan bahwa kedudukan berbagai agen atau aktor dalam lingkungan ditentukan oleh jumlah dan bobot relatif dari modal yang mereka miliki (Ritzer & Goodman, 2007). Casey (2008) menjadi orang pertama yang melakukan kuantifikasi teori Bourdieu untuk menghitung indeks pengaruh aktor berdasarkan modal yang dimiliki setiap aktor. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi para aktor lokal dominan dan indeks pengaruhnya berdasarkan modal yang mereka miliki dalam konteks penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini dilakukan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut: (1) Siapa saja aktor lokal yang mendominasi pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai? (2) Bagaimana indeks pengaruh para aktor tersebut berdasarkan kepemilikan modalnya dan pengaruhnya terhadap tindakan para aktor dalam menjalankan perannya masing-masing di arena pengelolaan keuangan desa? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi para aktor lokal yang mendominasi pengelolaan keuangan desa, mengukur indeks pengaruh dan kepemilikan modal serta tindakan sosial para aktor tersebut dalam menjalankan perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang mendasari tulisan ini adalah penelitian dengan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD). Arena yang dipilih dalam penelitian ini adalah arena pengelolaan keuangan desa untuk melihat keterlibatan aktor dalam mengakses sumber daya keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan dan Desa Sukadamai, Kecamatan Dramaga, keduanya di Kabupaten Bogor. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk terbanyak, jumlah desa kedua terbanyak dan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Jawa Barat (BPS Jabar, 2019). Kedua desa tersebut dipilih berdasarkan perbedaan karakteristik “desa-desa” dan “desa-kota” di Kabupaten Bogor. Mengacu pada Lanjouw et al. (2001), Desa Purwabakti berjarak sekitar 30 km dari batas terluar wilayah Kota Bogor sehingga dikategorikan sebagai desa *rural* (desa tipe desa-desa). Sedangkan Desa Sukadamai termasuk ke dalam desa dengan karakteristik *semi-urban* (desa tipe desa-kota) karena letaknya berjarak kurang dari 20 km dari batas Kota Bogor dan merupakan Desa yang sering bekerja sama dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3 IPB) dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, Kecamatan Dramaga merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Bogor.

Pelaksanaan tahap pertama rangkaian pengumpulan data adalah identifikasi aktor lokal yang dominan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dengan dua metode, yaitu wawancara mendalam kepada sepuluh orang tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa serta FGD dengan tujuh peserta. Tahap ini menghasilkan nama-nama tokoh yang berbeda karena setiap informan diminta untuk menyebutkan tiga orang aktor lokal yang dianggap dominan dalam pengelolaan keuangan desa beserta alasannya. Pengukuran indeks pengaruh aktor merupakan tahap penelitian kedua yang dilakukan setelah ketiga aktor di kedua desa teridentifikasi. Pengukuran indeks pengaruh aktor dilakukan dengan melakukan wawancara terstruktur terhadap responden di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai, Kabupaten Bogor sebanyak masing-masing 30 orang responden sehingga total responden dalam penelitian ini berjumlah 60 responden dengan unit analisisnya individu. Penentuan responden di Desa Purwabakti menggunakan teknik *accidental*, yaitu menjadikan orang yang ditemui secara tidak sengaja di lokasi penelitian dan dianggap sesuai sebagai sumber data (Sugiyono, 2019). Kriteria responden yang ditentukan adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Teknik ini digunakan karena tidak tersedianya kerangka sampling di Desa Purwabakti. Penentuan responden di Desa Sukadamai menggunakan teknik *simple random sampling* dikarenakan kerangka sampling yang tersedia bersifat homogen berdasarkan karakteristik penduduk desa usia produktif (15-64 tahun) dengan asumsi mereka merupakan warga desa yang sadar dan bahkan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian dilakukan sejak September 2019 hingga Agustus 2020. Data-data yang terkumpul ditabulasi untuk menghitung setiap modal yang dimiliki aktor, kemudian pengukuran indeks pengaruh aktor dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Casey, 2008):

$$\text{Indeks Pengaruh Aktor (Indeks Casey)} = Mm + Ms + Me + Mi + Msi + Mb + Mr \dots (1)$$

Keterangan:

Mm = Modal Manusia

Ms = Modal Sosial

Me = Modal Ekonomi

Mi = Modal Institusi

Msi = Modal Simbolik

Mb = Modal Budaya

Mr = Modal Moral

Nilai indeks pengaruh setiap aktor merupakan akumulasi dari nilai ketujuh modal (modal manusia, modal sosial, modal ekonomi, modal institusi, modal simbolik, modal budaya dan modal moral).<sup>3</sup> Setiap indikator modal akan diberi skor oleh responden dalam rentang -2 hingga +2. Skor positif dan negatif tersebut dibutuhkan untuk menggambarkan kesalingtergantungan antar modal. Skor modal aktor yang dinilai negatif oleh responden akan mengurangi skor positif aktor. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bourdieu bahwa tidak ada bentuk modal yang murni berdiri sendiri. Setiap modal (kapital) pasti mengandung elemen dari ragam lainnya dan saling berkaitan (Casey, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pertama dalam pengumpulan data berupa identifikasi aktor lokal dominan dalam arena pengelolaan keuangan desa memberikan hasil yang berbeda di antara dua lokasi penelitian. Pada kasus di Desa Purwabakti, nama-nama aktor yang disebutkan oleh kesepuluh informan adalah sekretaris desa, bendahara desa, tim pelaksana kegiatan (TPK) tingkat desa atau kepala urusan (Kaur) perencanaan, TPK

<sup>3</sup> Bourdieu (1986) mendefinisikan modal budaya sebagai watak, kebiasaan khas yang diakui dan kepemilikan atas benda-benda budaya. Modal sosial diartikan sebagai kumpulan sumber daya baik aktual maupun potensial terkait dengan kepemilikan jaringan yang tahan lama dan diakui. Modal ekonomi diartikan sebagai kepemilikan yang terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat produksi, materi dan uang. Sedangkan modal simbolik diartikan sebagai berbagai bentuk keistimewaan, status, kewenangan dan kekuasaan. Dalam mengukur pengaruh aktor, Casey (2008) kemudian menambahkan tiga modal lagi, yaitu modal manusia, modal institusi dan modal moral. Modal manusia diartikan sebagai gabungan dari kapasitas dan keterampilan, pengalaman dan pendidikan individu/aktor. Modal institusi adalah keterkaitan antara aktor dengan institusi yang menaunginya yang meliputi ideologi, dukungan, dan pengaruh institusi terhadap aktor. Modal moral adalah kemampuan yang digunakan untuk mendapat penilaian positif dari orang lain dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan orang lain.

lapang kegiatan pembangunan dan ketua perlindungan masyarakat (Linmas), sedangkan aktor lokal dominan yang disepakati dalam kegiatan diskusi kelompok terarah dan merupakan aktor dengan jumlah penyebutan terbanyak adalah sekretaris desa dengan inisial WY, bendahara desa dengan inisial AS dan TPK lapang kegiatan pembangunan infrastruktur desa dengan inisial MF (Tabel 1).

Tabel 1 Jumlah penyebutan aktor dominan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai tahun 2020

No	Aktor lokal yang disebutkan	Jumlah penyebutan aktor (kali)	
		Desa Purwabakti	Desa Sukadamai
1	Kepala Desa	-	1
2	Sekretaris Desa	10	10
3	Bendahara Desa	10	10
4	TPK Desa atau Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan	2	3
5	TPK Lapang kegiatan pembangunan	7	-
6	Ketua Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1	-
7	Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	-	6

Saat ini, kegiatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama di Desa Purwabakti sehingga TPK lapang yang memimpin kegiatan pembangunan infrastruktur skala desa seperti balai desa dan jalan desa adalah orang yang sama. Pada kasus di Desa Sukadamai, nama-nama aktor yang disebutkan oleh kesepuluh informan adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan kepala urusan (Kaur) perencanaan, sedangkan aktor lokal dominan yang disepakati dalam kegiatan diskusi kelompok terarah dan merupakan aktor dengan jumlah penyebutan terbanyak adalah sekretaris desa dengan inisial DK, bendahara desa dengan inisial SJ dan ketua LPM dengan inisial MS (Tabel 1). Nama ketua LPM seringkali disebut karena masyarakat merasa bahwa setiap saran program desa sering disampaikan kepada ketua LPM sehingga beliau dianggap selalu ikut serta juga dalam berbagai pengelolaan keuangan desa.

Secara garis besar, sekretaris desa dan bendahara desa selalu disebutkan oleh informan di kedua desa dikarenakan kedua aktor tersebut merupakan aparatur pemerintahan desa yang memang disebutkan dalam aturan pemerintah pusat, salah satunya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, untuk melaksanakan tugas tertentu dalam rangkaian pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Tidak heran jika kedua aktor tersebut memang dianggap pasti terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun aktor ketiga seringkali disebutkan oleh informan karena tingginya intensitas keterlibatan aktor tersebut dalam program desa dan pengelolaan keuangan desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau setidaknya kegiatan yang diketahui oleh masyarakat. Kepala desa tidak muncul dalam penyebutan informan di Desa Purwabakti karena informan menganggap Kepala Desa Purwabakti tidak terlibat aktif dalam pengelolaan keuangan desa, melainkan hanya memberi arahan dan mengetahui saja. Sedangkan di Desa Sukadamai, seorang informan merasa Kepala Desa Sukadamai ikut serta berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa dengan ikut serta mengecek langsung pengelolaan keuangan di desa mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Keterlibatan Kepala Desa Sukadamai dalam pengelolaan kepala desa dianggap sebagai bentuk pendampingan seorang ayah untuk membimbing putra kandungnya (sekretaris desa) untuk melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa.

Terpilihnya lima di antara enam orang aktor yang merupakan aparatur pemerintahan desa dan disahkan oleh kepala desa berdasarkan peraturan formal dan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat menunjukkan bahwa berbagai peraturan yang datang dari pemerintah pusat memberikan ruang yang sempit bagi masyarakat untuk ikut serta secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Jika melihat kuadran *power* dan *interest* dari Kolopaking et al. (2019), pemerintah desa menempati kuadran *high power* dan *high interest*. Hal ini memperkuat posisi kelima orang aktor dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dalam memilih staff di bawahnya pun memiliki kecenderungan untuk memilih orang-orang yang telah dikenal baik dan memiliki kedekatan dengan dirinya supaya kinerja staff tersebut dapat sesuai harapan. Contohnya adalah Bendahara Desa Purwabakti dan Sekretaris Desa Sukadamai yang merupakan putra dari kepala desa yang sedang menjabat. Jika dilihat berdasarkan lokasi tempat tinggal, rumah bendahara desa dan Ketua LPM Desa Sukadamai juga berdekatan dengan tempat tinggal kepala desa yang saat ini menjabat sehingga memiliki kemungkinan yang besar untuk sering berinteraksi.

Dengan adanya kondisi seperti ini, masyarakat hanya bisa berpartisipasi secara tidak langsung dalam pengelolaan keuangan desa melalui aktor-aktor tersebut.

Aktor dan modal tidak dapat terpisahkan dalam sebuah arena pertarungan. Posisi aktor ditentukan oleh modal yang dimilikinya (Bourdieu, 1993, 2005, 2008a). Neveu (2018) mendefinisikan modal sebagai kumpulan barang, keterampilan, pengetahuan dan pengakuan yang dimiliki individu atau kelompok yang dapat digunakan untuk mengembangkan pengaruh dan mendapatkan kekuasaan. Berdasarkan pengukuran indeks pengaruh aktor yang dilakukan di kedua desa, nilai indeks pengaruh aktor dari 30 responden di setiap desa kemudian dihitung nilai rata-ratanya sehingga menghasilkan nilai rata-rata indeks pengaruh aktor (Tabel 2). Status aktor paling berpengaruh di Desa Purwabakti dimiliki oleh TPK lapang (MF), sedangkan aktor paling berpengaruh di Desa Sukadamai adalah sekretaris desa (DK) (Tabel 2). Responden Desa Purwabakti menilai bahwa TPK lapang yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat karena memang MF merupakan aktor yang diusulkan oleh masyarakat untuk menjadi TPK lapang di bidang pembangunan infrastruktur. Begitupun dengan responden di Desa Sukadamai yang menilai bahwa sekretaris desa adalah aktor yang paling berpengaruh di Desa Sukadamai karena DK merupakan penduduk asli desa dan memiliki kinerja serta kepribadian yang baik sehingga dihormati dan dipatuhi oleh warganya.

Tabel 2 Rata-rata indeks pengaruh aktor di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai tahun 2020

Aktor	Rata-Rata Indeks Pengaruh Aktor	
	Desa Purwabakti	Desa Sukadamai
Sekretaris Desa	2.93	28.20
Bendahara Desa	1.53	20.13
TPK Lapang/ Ketua LPM*	7.47	23.73

\*): TPK Lapang di Desa Purwabakti dan Ketua LPM di Desa Sukadamai

Penilaian dari responden di kedua desa menunjukkan bahwa pengaruh aktor sangat dipengaruhi oleh kedekatan antara aktor dengan masyarakat. Semakin baik dan semakin dekat relasi sosial antara aktor dengan masyarakat, maka pengaruh aktor tersebut juga akan semakin besar bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bourdieu bahwa modal aktor dapat berupa hubungan sosial, yaitu energi yang hanya ada dan hanya berdampak pada arena di mana modal tersebut diproduksi dan direproduksi. Modal tersebut juga dapat digunakan untuk memetakan pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat (Bourdieu, 2008b, 2018). Dalam penelitian ini hubungan kekuasaan yang digambarkan adalah kekuasaan antara aktor lokal dominan dengan masyarakat dalam arena pengelolaan keuangan desa.

Secara keseluruhan, rata-rata indeks aktor di Desa Sukadamai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks aktor di Desa Purwabakti (Tabel 2). Perbedaan yang signifikan antara rata-rata indeks di Desa Purwabakti dengan Desa Sukadamai disebabkan karena responden di Desa Purwabakti lebih banyak menilai aktor dengan skor "0" yang artinya rata-rata atau netral. Banyak juga responden yang memberi skor "0" karena tidak tahu atau tidak mengenal aktor yang ditanyakan pada responden tersebut. Ketidaktahuan responden terhadap aktor yang merupakan aparatur pemerintahan desa ini dikarenakan tempat tinggalnya yang berjarak jauh dari balai desa dan tempat tinggal aktor. Selain itu, responden merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan sehingga intensitas komunikasi dengan aktor pun sangat kecil. Berbeda halnya dengan kondisi responden di Desa Sukadamai yang hampir seluruhnya mengetahui ketiga aktor yang sedang dinilai. Selain karena jarak antar wilayah RW yang berdekatan, responden di Desa Sukadamai juga merasa selalu dilibatkan dalam berbagai tahapan pembangunan desa sehingga mereka sering berkomunikasi atau setidaknya mengenal ketiga aktor yang sedang dinilai. Selain kondisi geografis, tingkat pendidikan responden juga memengaruhi tingkat pemahaman responden terhadap pengelolaan keuangan desa dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Tingkat pendidikan responden di Desa Sukadamai cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan responden di Desa Purwabakti. Hal ini menyebabkan responden di Desa Sukadamai lebih memiliki kesadaran dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan di desanya masing-masing. Hal ini sejalan dengan hasil analisis pengaruh yang dilakukan oleh Olli et al. (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Perbedaan karakteristik antara Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai juga memengaruhi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin sulit akses antar wilayah di desa, maka

masyarakat pun akan semakin jarang berinteraksi dengan pihak desa dan semakin jarang memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan di desa. Widhiastini et al. (2019) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa faktor geografis menjadi salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi politik.

Ruang partisipasi masyarakat yang sempit menyebabkan efektivitas pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa sangat bergantung pada integritas dari para aktor yang secara langsung terlibat. Jika para aktor tersebut bertanggung jawab atas tugasnya sebagai pelayan masyarakat, maka mereka akan melakukan tugasnya demi memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan jika para aktor tersebut lebih memanfaatkan akses yang dimilikinya dalam pengelolaan keuangan desa untuk kepentingan pribadi semata, maka tujuan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa berupa kesejahteraan masyarakat secara merata tidak akan pernah tercapai.

### Modal Para Aktor di Desa Purwabakti

Salah satu aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti adalah sekretaris desa (WY). WY bersekolah hingga jenjang SLTA. Sebelum bekerja sebagai aparatur pemerintahan desa, WY bermatapencaharian sebagai pedagang. Sejak tahun 2009, WY mulai bekerja di Kantor Desa Purwabakti sebagai kepala urusan (Kaur) pemerintahan. Pada periode pemerintahan desa tahun 2013 hingga saat ini, WY dipercaya sebagai sekretaris desa. Sebagai sekretaris desa, tugas dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai koordinator tim verifikator yang akan menentukan program prioritas untuk direalisasikan terlebih dahulu dalam satu tahun. Sebagai tim verifikator, langkah kerjanya adalah: (1) survai langsung ke lokasi diusulkannya program, (2) melakukan pengukuran untuk dimasukkan ke dalam RKPDes, (3) bermusyawarah untuk menentukan usulan program tersebut masuk ke dalam kategori penting mendesak sehingga harus direalisasikan tahun depan atau bisa ditunda tahun berikutnya.

Berdasarkan penilaian responden, skor modal tertinggi dibandingkan keenam modal lainnya yang dimiliki oleh WY terdapat pada modal institusi (MI), yaitu sebesar 2.90 (Tabel 3). Hal ini dapat terjadi karena dalam melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris desa dan tim verifikator dalam pengelolaan keuangan desa, WY sangat dipengaruhi oleh instruksi dan arahan pemerintah desa, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga di desa. Seluruh pengaruh ini bersifat legal formal karena dilandasi oleh aturan yang ada.

Tabel 3 Skor modal aktor di Desa Purwabakti tahun 2020

Aktor	Skor modal aktor						
	Mm <sup>a</sup>	Mi <sup>b</sup>	Ms <sup>c</sup>	Ms <sub>i</sub> <sup>d</sup>	Me <sup>e</sup>	Mb <sup>f</sup>	Mr <sup>g</sup>
Sekretaris Desa (WY)	-0.63	2.90	-0.20	-0.43	-0.53	-0.13	1.53
Bendahara Desa (AS)	-1.57	2.53	-1.37	1.50	0.97	-0.60	0.73
TPK Lapangan Infrastruktur (MF)	1.37	1.27	1.20	-0.87	1.60	0.17	1.40

Keterangan:<sup>a</sup>Mm=Modal Manusia; <sup>b</sup>Mi=Modal Institusi; <sup>c</sup>Ms=Modal Sosial; <sup>d</sup>Ms<sub>i</sub>=Modal Simbolik; <sup>e</sup>Me=Modal Ekonomi; <sup>f</sup>Mb=Modal Budaya; <sup>g</sup>Mr=Modal Moral

Dalam melaksanakan perannya sebagai sekretaris desa, WY pernah membantu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, salah satunya ketika warga Dusun 3 Kampung Hegarmanah ingin membuat drainase namun anggaran desa tidak cukup. WY membantu mengajukan proposal kepada PT. Indonesia Power atas nama kelompok masyarakat dan TPK lapang. Tindakan yang dilakukan WY tersebut dinilai sangat positif oleh masyarakat sehingga responden menilai modal moral dengan skor 1.53 (Tabel 3). Selain modal institusi dan modal moral, kelima modal lainnya yang dimiliki oleh WY bernilai negatif yang artinya modal-modal tersebut dinilai tidak cukup tinggi bahkan tidak dimiliki oleh WY sehingga tidak memiliki kontribusi positif kepada indeks pengaruh yang dimiliki WY (Tabel 3).

Kepemilikan modal sosial, modal simbolik dan modal budaya WY bernilai minus, yaitu berturut-turut sebesar -0.20, -0.43 dan -0.13 (*lihat* Tabel 3). Hal ini karena responden menilai WY tidak memiliki jaringan dengan pihak di luar desa, selain jaringan yang terkait dengan pekerjaannya sebagai sekretaris desa, dan tidak memiliki gelar dan keistimewaan khusus. Hal ini juga diakui oleh WY ketika dikonfirmasi mengenai kepemilikan modal tersebut. Selain itu, WY juga belum pernah menerima penghargaan dan prestasi. Namun, beberapa keturunan sebelum WY juga merupakan sekretaris desa

sehingga WY dipercaya sebagai sekretaris desa. Dalam hal budaya, WY juga bukan seorang tokoh budaya dan mampu memengaruhi orang lain dalam hal budaya. Namun, WY selalu mengikuti aturan dan budaya yang ada. Bahasa yang digunakan adalah bahasa lokal (Sunda) sehingga masyarakat dengan mudah memahami maksud dan tujuan WY. Pembawaan dan tata krama WY juga diterima oleh masyarakat.

Selain WY, aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti adalah bendahara desa (AS). Tingkat pendidikan AS hingga jenjang SLTA melalui paket penyeteraan (Paket C). Sebelum menjadi bendahara desa, AS bekerja di Jakarta sebagai karyawan di perusahaan alat-alat teknik, pembuatan kunci mobil serta pernah juga menjadi tukang cat bagi mitra-mitra salah satu perusahaan rokok di Indonesia. Bendahara desa juga berperan sebagai kaur keuangan desa. Beberapa tugas AS dalam pengelolaan keuangan desa adalah: (1) mengambil uang desa dari rekening desa ke bank didampingi oleh kepala desa dengan nominal sesuai dengan permohonan pencairan dari TPK Lapangan yang sedang melaksanakan pembangunan serta kebutuhan desa lainnya, dan (2) mendistribusikan uang yang diambil sesuai dengan kebutuhan tidak lebih dari tiga hari. Sama seperti sekretaris desa, modal institusi yang dimiliki AS merupakan modal dengan skor tertinggi dibandingkan keenam modal lainnya, yaitu sebesar 2.53. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan AS sebagai bendahara desa yang disahkan secara formal sehingga mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa. Selain itu, seluruh tindakan AS sendiri dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tabel 3). Hal ini disampaikan langsung oleh AS bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara desa, AS mengacu pada Peraturan Menteri Desa dan PDTT, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

AS mulai menjadi bendahara desa pada periode pemerintahan desa tahun 2018 hingga saat ini di mana ayah tirinya menjabat sebagai kepala desa. Kakek kandung AS dulu bekerja sebagai penarik pajak bumi dan bangunan (PBB) dan menjadi sekretaris desa saat kepala desa pertama menjabat di Desa Purwabakti. Berdasarkan keturunan sebelumnya yang juga merupakan sekretaris desa dan ayah tiri sebagai kepala desa, AS dinilai oleh responden memiliki modal simbolik yang cukup tinggi dengan skor 1.50 (Tabel 3). Selain modal institusi dan modal simbolik, modal ekonomi dan modal moral yang dimiliki AS juga bernilai positif, yaitu sebesar 0.97 dan 0.73 (Tabel 3). Artinya, modal ekonomi dan modal moral yang dimiliki AS dinilai memiliki pengaruh meskipun dalam kekuatan yang rendah. AS sering ikut serta dalam pembangunan sukarela setiap seminggu sekali sehingga responden menganggap hal ini merupakan alasan memberikan penilaian positif terhadap modal moral yang dimiliki AS. Sedangkan mengenai modal ekonomi, AS menjelaskan sebagai berikut.

*“Kalau sebagai bendahara, [saya] ada pendapatan setiap tiga bulan sekali. Kalau rumah, saya ada 2 rumah, 1 untuk ditempati dan 1 untuk dikontrakan. Kalau mobil ada 1 mobil keluaran 2016 warisan dari mertua. Lahan juga warisan dari mertua dan orang tua sekitar 2000 meter<sup>2</sup> tapi digarap sama orang lain, bagi hasil aja, Neng. Kolam ikan juga ada, tapi lagi nggak dipakai”. (AS, 32 tahun)*

Modal manusia, modal sosial dan modal budaya yang dimiliki AS bernilai minus secara berurutan sebesar -1.57, -1.37 dan -0.60 yang artinya ketiga modal tersebut dinilai tidak cukup tinggi dimiliki oleh AS dan tidak memberikan kontribusi terhadap pengaruh yang dimiliki AS (Tabel 3). Hal ini juga diakui oleh AS bahwa dirinya tidak memiliki jaringan sosial di luar desa selain jaringan yang terkait persoalan pemerintahan desa. AS juga tidak tergabung dalam kelompok sosial yang ada di masyarakat Desa Purwabakti. Modal budaya AS bernilai negatif karena AS bukan merupakan tokoh adat yang kental akan budaya lokal, tidak memiliki karya seni budaya dan tidak memengaruhi orang lain dalam aspek budaya. Namun, AS menggunakan bahasa lokal (bahasa Sunda) dan informal dalam berkomunikasi dengan orang lain, memiliki kepribadian yang baik dan tidak pernah melakukan hal negatif yang mengganggu masyarakat.

Aktor lokal dominan ketiga di Desa Purwabakti adalah MF sebagai TPK lapang khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. MF bersekolah hingga kelas 3 SD di Desa Purwabakti. Selama pembangunan infrastruktur di desa, MF selalu ditunjuk menjadi TPK lapang karena pengalamannya di bidang pembangunan fisik dan konstruksi yang cukup lama. Sebelum aktif di desa, MF juga memiliki riwayat pekerjaan di beberapa tempat seperti PT. Timah Bangka Belitung dan perusahaan pemasangan alat-alat berat di Jakarta. Berdasarkan pengalaman dan kemampuan MF di bidang konstruksi tersebut, responden menilai modal manusia yang dimiliki MF cukup mampu dengan skor 1.37 (Tabel 3).

Selain modal manusia, kepemilikan modal MF yang bernilai positif adalah modal institusi, modal sosial, modal ekonomi, modal budaya dan modal moral. Meskipun MF bukan bagian formal dari institusi pemerintahan desa, MF melaksanakan tugas sesuai dengan arahan kepala desa dan aparatur pemerintahan desa terkait sehingga modal institusi yang dimiliki MF masih bernilai positif sebesar 1.27 (Tabel 3). Modal sosial MF dinilai positif dengan skor sebesar 1.20 (*lihat* Tabel 3) karena dipengaruhi salah satunya oleh pekerjaan utama MF sebagai peternak yang juga menjual hasil ternaknya sehingga MF memiliki jaringan para penjual ternak di desa-desa lainnya. MF juga menjalin hubungan dengan banyak toko penyedia bahan bangunan terkait tugasnya sebagai TPK lapang bagian infrastruktur. Hal ini memberikan dampak positif berupa harga bahan bangunan yang lebih murah dibandingkan toko-toko lainnya.

Modal ekonomi menjadi modal dengan skor tertinggi di antara keenam modal MF lainnya, yaitu sebesar 1.60 (Tabel 3). Hal ini sejalan dengan jawaban MF ketika ditanyakan terkait aset atau barang berharga yang dimiliki. MF menyebutkan di antaranya 1 buah mobil hasil gadai, 1 unit rumah yang dibangun sendiri, lahan seluas ½ hektar yang ditanami pohon pisang dan merupakan warisan, kambing sekitar 40 ekor yang ada di kandang dengan pekerja peternakan 5 orang, pekerja kebun 1 orang, serta membuka warung di rumahnya yang dijaga oleh istrinya. Hal ini juga yang menjadi landasan responden menilai bahwa MF memiliki modal ekonomi yang cukup tinggi. Modal budaya yang dimiliki MF juga bernilai positif namun dengan skor yang rendah, yaitu sebesar 0.17 (*lihat* Tabel 3) karena MF bukan merupakan tokoh yang berpengaruh dalam hal budaya. Namun, MF menggunakan bahasa lokal (Sunda) dalam kesehariannya sehingga mudah menjalin kedekatan dengan masyarakat lainnya. Modal moral juga dinilai positif karena sebagian besar responden menilai MF memiliki pribadi dan sifat yang baik serta tidak pernah melakukan hal negatif yang mengganggu masyarakat.

Modal simbolik yang dimiliki MF menjadi satu-satunya modal yang bernilai negatif, yaitu sebesar -0.87. Hal ini karena responden menilai MF tidak memiliki keistimewaan, tidak memiliki gelar, prestasi dan penghargaan serta MF bukan merupakan turunan dari tokoh yang berpengaruh di desa (Tabel 3).

### Modal Para Aktor di Desa Sukadamai

Salah satu aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sukadamai adalah sekretaris desa (DK). DK adalah putra kandung dari kepala desa yang saat ini sedang menjabat. Sebelum menjadi sekretaris desa, DK membantu ayahnya mengelola usaha sepatu bayi. Ayah DK yang juga kepala desa saat ini adalah pengusaha sepatu bayi semenjak tahun 1980 dan produknya berhasil diekspor sampai ke India dan Pakistan. Responden menilai, walaupun DK adalah putra kandung dari kepala desa, DK melakukan tugasnya dengan baik, memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memiliki kemampuan yang baik di bidangnya. DK juga sempat mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, namun tidak sempat menyelesaikannya sehingga ijazah terakhir yang dimilikinya adalah ijazah SMA/SLTA. Namun, pengalaman di perguruan tinggi juga diaplikasikan selama menjabat sebagai sekretaris desa sehingga masyarakat merasakan kinerja DK yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian responden terhadap kepemilikan DK atas modal manusia, modal sosial dan modal moral dengan skor berturut-turut sebesar 4.27, 4.77 dan 5.08 (Tabel 4). Modal moral yang dimiliki oleh DK merupakan modal dengan skor tertinggi dibandingkan skor keenam modal lainnya. Artinya modal moral yang dimiliki DK dinilai paling memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap indeks pengaruh yang dimiliki oleh DK.

Tabel 4 Skor modal aktor di Desa Sukadamai tahun 2020

Aktor	Skor modal aktor						
	Mm <sup>a</sup>	Mi <sup>b</sup>	Ms <sup>c</sup>	Ms <sub>i</sub> <sup>d</sup>	Me <sup>e</sup>	Mb <sup>f</sup>	Mr <sup>g</sup>
Sekretaris Desa (DK)	4.27	4.77	4.77	3.07	2.60	2.93	5.80
Bendahara Desa (SJ)	3.07	3.37	3.60	1.00	1.37	2.17	5.57
Ketua LPM (MS)	2.77	3.70	4.47	2.23	1.50	2.90	6.17

Keterangan: <sup>a</sup>Mm = Modal Manusia; <sup>b</sup>Mi = Modal Institusi; <sup>c</sup>Ms = Modal Sosial; <sup>d</sup>Ms<sub>i</sub> = Modal Simbolik; <sup>e</sup>Me = Modal Ekonomi; <sup>f</sup>Mb = Modal Budaya; <sup>g</sup>Mr = Modal Moral

Modal institusi DK juga memiliki skor yang cukup tinggi, yaitu sebesar 4.77 (*lihat* Tabel 4). Hal ini karena tindakan dan ideologi yang dimiliki DK banyak dipengaruhi oleh institusi. Kedudukan DK sebagai sekretaris desa juga memengaruhi sikap dan perilaku DK dalam kesehariannya. Kepala desa yang juga ayah kandung DK memberikan dukungan moril yang besar terhadap DK.

Modal ekonomi dan modal budaya memiliki skor yang paling rendah di antara modal lainnya yaitu berturut-turut sebesar 2.60 dan 2.93 (Tabel 4). Penilaian responden tersebut diberikan kepada DK karena responden menilai DK memiliki pribadi yang sederhana. DK juga bukan merupakan tokoh yang kental nilai budaya dan adatnya. “*Nu beunghar mah bapana, Neng. Putrana mah meunang pamere bapana.*” (Yang kaya itu bapaknya, Dek. Kalau anaknya (DK) dapat pemberian (aset/lahan) dari bapaknya) (HI, 35 tahun).

Pernyataan sebagian besar responden hampir sama dengan pernyataan HI ketika ditanyakan terkait modal ekonomi yang dimiliki oleh DK. Aktor lokal dominan kedua adalah bendahara desa (SJ). SJ sudah memiliki pengalaman yang baik dalam hal pengelolaan keuangan karena pernah menjadi pegawai di salah satu bank swasta di Kota Bogor. SJ juga merupakan lulusan sarjana jurusan ekonomi di salah satu universitas swasta di Bogor. Berdasarkan hal tersebut, responden menilai modal manusia dengan skor 3.07 yang artinya modal manusia yang dimiliki SJ memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap indeks pengaruh SJ (Tabel 4). Responden menilai modal institusi yang dimiliki SJ dengan skor sebesar 3.37 (Tabel 4). Skor ini diperoleh karena sebagian besar responden melihat kedudukan SJ sebagai bendahara yang semua tindakannya juga pasti sesuai dengan aturan dan instruksi dari pemimpin di institusi (pemerintahan desa). SJ juga menyatakan bahwa dirinya tergabung dengan paguyuban bendahara desa di Kabupaten Bogor untuk saling berkomunikasi terkait pekerjaannya sebagai bendahara. Hal ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja SJ sebagai bendahara desa. Jaringan dan intensitas komunikasi dengan jaringan yang dimiliki SJ dinilai sebagai modal sosial yang baik bagi SJ sehingga responden juga memberikan skor sebesar 3.60 dan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap indeks pengaruh SJ (Tabel 4).

Penilaian responden terhadap tiga modal lainnya, yaitu modal simbolik, modal ekonomi dan modal budaya, cenderung rendah berturut-turut sebesar 1.00, 1.37, 2.17 (Tabel 4). Hal ini karena responden menilai bahwa SJ tidak memiliki keistimewaan, prestasi dan penghargaan. SJ juga hidup sederhana dengan suami sebagai penjahit pakaian *taekwondo* dan tinggal bersama orang tua. SJ juga mengakui bahwa dirinya tidak memiliki lahan dan aset lainnya serta tidak ada sumber penghasilan lain selain penghasilan utama SJ dan suami. SJ juga bukan merupakan tokoh budaya yang masih memegang teguh budayanya dan mengajak orang lain untuk menerapkan budaya. Satu hal yang masih SJ terapkan adalah menggunakan bahasa lokal (Sunda) dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya secara informal. Modal tertinggi di antara keenam modal yang dimiliki SJ yaitu modal moral dengan skor sebesar 5.57 (Tabel 4). Menurut sebagian responden, SJ memiliki kepribadian yang baik, ramah dan selalu bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. SJ juga selalu transparan soal keuangan desa. Hal ini yang menjadikan SJ selalu mendapat dukungan dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara desa.

Aktor lokal dominan ketiga dalam pengelolaan keuangan di Desa Sukadamai adalah ketua LPM (MS) yang menjadi ketua LPM di Desa Sukadamai sejak tahun 2017 setelah pensiun dari salah satu perusahaan otomotif di Bogor pada tahun 2015. Tingkat pendidikan terakhir MS adalah jenjang SLTA. Sebagai ketua LPM, MS menempatkan diri sebagai mitra kepala desa dalam hal pemberdayaan dan pembangunan desa. MS juga menjadi orang yang paling sering dihubungi oleh masyarakat ketika memiliki usulan atau keluhan terkait program pembangunan di desa. Berdasarkan kedekatan tersebut, sebagian besar responden menilai modal moral yang dimiliki MS dengan skor tertinggi, yaitu sebesar 6.17 (Tabel 4). Modal sosial merupakan modal dengan skor tertinggi kedua setelah modal moral yang dimiliki MS dengan skor sebesar 4.47 (Tabel 4). Hal ini sesuai dengan pernyataan MS sendiri bahwa dirinya aktif dalam kerjasama antar desa dalam hal pembangunan yang kemudian kerjasama tersebut sering berlanjut dalam berbagai hal lainnya. Kerjasama tersebut memudahkan MS dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua LPM dengan cara saling berbagi informasi dan studi banding untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Desa Sukadamai. Modal institusi yang dimiliki oleh MS juga cukup tinggi dengan skor sebesar 3.70 (Tabel 4). Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai tindakan MS sangat dipengaruhi oleh institusi pemerintahan desa dan peraturan terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban MS sebagai ketua LPM.

Modal manusia, modal simbolik, modal budaya memiliki skor yang berdekatan, yaitu berturut-turut sebesar 2.77, 2.23, 2.90 (Tabel 4). Skor tersebut menunjukkan bahwa ketiga modal tersebut cukup memberikan kontribusi terhadap indeks pengaruh yang dimiliki MS. Responden yang menilai bahwa MS memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik di bidangnya serta selalu menerapkan nilai budaya dan memengaruhi orang lain dalam hal budaya masih lebih banyak dibandingkan responden yang menilai sebaliknya. Menurut salah satu responden, MS juga pernah menjadi kepala sekolah di tempat

responden tersebut bersekolah sehingga MS dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh di desa. Modal ekonomi MS memiliki skor paling rendah di antara enam modal lainnya, yaitu sebesar 1.50 (Tabel 4). MS dinilai memiliki kondisi ekonomi yang sederhana meskipun berdasarkan pernyataan MS sendiri, MS memiliki lahan seluas 500 m<sup>2</sup> dan mempekerjakan orang lain sebagai buruh pertanian sebagai sumber pendapatan bagi MS selain sebagai ketua LPM. Perbedaan antara penilaian responden dengan kondisi sebenarnya bisa jadi disebabkan oleh ketidaktahuan responden terhadap kepemilikan ekonomi MS yang sebenarnya.

Berdasarkan penilaian terhadap aktor di dua lokasi tersebut, terlihat perbedaan yang sangat mencolok pada skor tertinggi yang dimiliki oleh setiap aktor. Di Desa Purwabakti, modal aktor tertinggi yang dimiliki oleh setiap aktor adalah **modal institusi** (Mi) yang dimiliki oleh WY dengan skor modal sebesar 2.90 dan AS sebesar 2.53 serta **modal ekonomi** (Me) yang dimiliki oleh MF dengan skor modal sebesar 1.60 (Tabel 3). Sedangkan di Desa Sukadamai, modal aktor tertinggi yang dimiliki oleh DK, SJ dan MS adalah **modal moral** (Mr) berturut-turut sebesar 5.80, 5.57, 6.17 (Tabel 4).

### **Tindakan Para Aktor dalam Arena Pengelolaan Keuangan Desa**

Bourdieu menyebutkan bahwa seorang aktor memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik atau tindakan sosial dengan cara tertentu dalam arena tertentu. Kecenderungan ini Bourdieu sebut sebagai *habitus* yang dapat dimaknai salah satunya sebagai “modus operandi”, yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman aktor. Latar belakang aktor ini dapat berupa latar belakang pendidikan, keluarga, motivasi menjadi aktor dalam arena serta pengalaman semasa hidup aktor yang berkaitan dengan kontestasi dalam arena.

Dari keenam aktor lokal dominan di kedua desa, terdapat perbedaan latar belakang pendidikan yang cukup mencolok: tingkat pendidikan tertinggi aktor Desa Purwabakti adalah sampai pada jenjang SLTA/SMA, sedangkan aktor di Desa Sukadamai memiliki tingkat pendidikan terakhir yang paling rendah adalah SMA. Tingkat pendidikan terakhir sekretaris dan bendahara Desa Purwabakti (WY dan AS) sampai pada jenjang SMA, sedangkan TPK Lapang Desa Purwabakti (MF) sampai kelas 3 SD. Tingkat pendidikan terakhir sekretaris dan ketua LPM Desa Sukadamai (DK dan MS) adalah sampai jenjang SMA, meskipun khusus untuk DK sudah pernah mengenyam bangku perguruan tinggi negeri kendati tidak sampai menyelesaikan tugas akhirnya. Sedangkan bendahara Desa Sukadamai (SJ) memiliki tingkat pendidikan terakhir sampai jenjang sarjana ekonomi di salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor.

Selain latar belakang pendidikan, pengalaman yang dimiliki para aktor di kedua desa tentu berbeda yang dipengaruhi terutama oleh jarak desa ke pusat kota. Desa Sukadamai sebagai desa yang memiliki jarak lebih dekat dengan Kota Bogor dan beberapa perguruan tinggi di Bogor memungkinkan warganya memiliki pengalaman bekerja sama dan berinteraksi dengan pihak luar desa yang lebih banyak dibandingkan para aktor di Desa Purwabakti yang berjarak jauh dari pusat Kota Bogor. Hal ini diakui para aktor di Desa Purwabakti dan tercermin dari skor modal sosial mereka yang lebih rendah dibandingkan skor modal sosial para aktor di Desa Sukadamai (lihat Tabel 13 dan 14).

Latar belakang dan pengalaman aktor tersebut kemudian mendorong aktor menggunakan modal-modal yang dimilikinya dalam menjalankan perannya di arena pengelolaan keuangan desa. Modal aktor juga menjadi hal penting untuk digunakan aktor ketika berkontestasi dalam sebuah arena untuk memperoleh kedudukan. Kepemilikan modal tersebut digunakan oleh aktor dalam mengambil kebijakan pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan tindakan para aktor dalam menyiasati pembiayaan pembangunan infrastruktur desa yang nilainya melebihi alokasi yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh keputusan dalam musyawarah desa bersama para tokoh masyarakat.

Pada sekitar bulan Agustus-Desember di tahun berjalan penyelenggaraan pemerintahan desa, pagu indikatif biasanya diturunkan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa sebagai gambaran besaran anggaran yang akan turun di tahun depan. Pada tahap ini, desa membentuk tim khusus yang berjumlah 7 atau 11 orang yang diketuai oleh sekretaris desa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Penyusunan APB Desa didasarkan pada rencana kegiatan pembangunan desa yang telah disepakati dan ditentukan prioritasnya oleh masyarakat mulai dari tingkat RT hingga tingkat desa. Dalam penentuan prioritas kegiatan pembangunan tersebut dibatasi oleh ketersediaan anggaran yang dimiliki desa. Oleh karena itu, ada kalanya kegiatan yang diusulkan masyarakat tidak dapat

direalisasikan di tahun yang sama. Para aktor lokal dominan di setiap desa memiliki strategi masing-masing untuk mengatasi persoalan keterbatasan anggaran tersebut.

Pada kasus di Desa Purwabakti, tindakan WY dan AS ditunjukkan melalui penggunaan kekuatan modal institusi yang dimiliki dalam mengatasi terkendalanya pembangunan drainase dan gorong-gorong di Dusun 3 Kampung Hegarmanah pada tahun 2019. Berdasarkan hasil musyawarah desa, pembangunan drainase tersebut tidak bisa dimasukkan dalam daftar kegiatan yang direalisasikan pada tahun 2020 karena kurangnya anggaran desa. Namun, penduduk di Kampung Hegarmanah merasa pembangunan drainase dan gorong-gorong tersebut penting untuk segera direalisasikan. Sebagai sekretaris desa, WY tidak bisa semata-mata mengubah hasil musyawarah desa mengenai kegiatan yang akan direalisasikan di tahun 2020. WY juga tidak bisa mengubah batasan alokasi anggaran yang telah tertuang dalam pagu indikatif dari pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, WY memberikan solusi berupa pengajuan proposal senilai 50 juta rupiah ke PT. Indonesia Power yang merupakan perusahaan di wilayah Desa Purwabakti untuk pembangunan drainase dan gorong-gorong di dusun 3. WY merasa, solusi tersebut sudah sesuai dengan kapasitas WY sebagai sekretaris desa agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan sekaligus menjalankan peran sekretaris desa tanpa mengubah pagu indikatif dari pemerintah kabupaten dan hasil musyawarah di desa. Sedangkan AS mengatasi persoalan tersebut dengan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk menerima keputusan prioritas pembangunan, sedangkan agenda pembangunan yang belum terlaksana akan direncanakan lagi tahun depan. Adapun MF dengan modal ekonomi yang dimiliki seringkali mengeluarkan uang pribadi jika pengeluaran kebutuhan kegiatan yang dibawahinya melebihi anggaran yang ada.

Lin (2001) mengartikan modal institusional sebagai modal yang memiliki kaitan dengan ideologi dan kekuasaan yang berlaku serta dikaitkan dengan sumber daya yang dibawa oleh lembaga pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa modal WY dan AS sebagai aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh ideologi dan aturan pemerintahan desa, bukan dari modal yang bersumber dari individu kedua aktor tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sjaf (2019a) mengenai besarnya pengaruh pemerintah pusat ke desa melalui peraturan yang ketat telah menyebabkan otonomi penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa sangat terbatas dan memberikan ruang partisipasi yang rendah kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai asas rekognisi dan asas subsidiaritas desa belum sepenuhnya terlaksana.<sup>4</sup>

Dalam mengartikan modal moral, Kane (2001) menyebutkan bahwa modal moral merupakan modal yang berkaitan dengan orang lain untuk mencapai tujuan akhir. Terdapat perhatian juga terhadap prinsip, nilai dan aspek kehidupan lainnya. Pencapaian tujuan akan berhasil jika aktor dapat memadukan modal moral dengan kemampuan politik yang baik dan dianggap berharga oleh orang lain. Pemberian skor yang tinggi dari responden terhadap modal moral sekretaris desa, bendahara desa dan ketua LPM di Desa Sukadamai (*lihat* Tabel 4) menunjukkan bahwa ketiga aktor tersebut dapat menggunakan modal moral yang dimiliki dalam menjalankan perannya sebagai aparatur pemerintahan desa sehingga responden merasakan kepuasan dan manfaat dari kinerja ketiga aktor tersebut khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Hal ini dibuktikan oleh tindakan pemerintah desa termasuk ketiga aktor tersebut ketika kebutuhan desa atas pembangunan infrastruktur khususnya jalan desa melebihi pagu indikatif yang ditetapkan oleh Bupati Bogor, yaitu persentase pembangunan fisik dalam anggaran desa tidak boleh melebihi 70 persen. Namun, karena kondisi Desa Sukadamai memang sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, para aktor lokal memilih tidak membatasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 70 persen semata. Sebaliknya, mereka berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan desa yang melebihi persentase tersebut dengan memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan oleh Bupati Bogor. Langkah-langkah yang dilalui para aktor tersebut adalah membahas persoalan perencanaan penganggaran bersama para perwakilan masyarakat dalam musyawarah desa, melampirkan berita acara musyawarah yang menunjukkan kesepakatan partisipan atas perencanaan penganggaran dan melampirkan daftar tanda tangan seluruh peserta musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga aktor di Desa

---

<sup>4</sup> Eko et al. (2014) menyebutkan bahwa subsidiaritas memiliki tiga makna, salah satunya adalah pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap kewenangan lokal desa, sebaliknya memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kewenangan dan pemerintahan desa. Intervensi yang dapat dilakukan pemerintah pusat adalah dengan pendekatan pemberdayaan desa yang sesuai dengan amanat UU Desa Nomor 6 tahun 2014 (Ra'is, 2017).

Sukadamai tidak semata-mata tunduk pada peraturan yang berasal dari pemerintah di atasnya, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Berdasarkan perbedaan latar belakang dan pengalaman para aktor, terlihat bahwa aktor yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan sering berinteraksi dengan pihak luar desa terutama instansi perguruan tinggi seperti para aktor lokal di Desa Sukadamai (DK, SJ, MS) akan mengutamakan modal moral demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat, yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui perubahan terhadap peraturan yang ada sesuai dengan ketentuan perubahan tersebut. Sedangkan aktor yang memiliki interaksi lebih sedikit dengan pihak luar seperti para aktor di Desa Purwabakti (WY, AS, MF) akan memberikan solusi atas permasalahan anggaran di desa secara praktis tanpa melakukan modifikasi pelaksanaan peraturan dari pemerintah di atasnya.

Perbedaan tindakan yang dilakukan dan modal dominan yang digunakan oleh setiap aktor menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki strategi yang berbeda untuk mempertahankan posisinya dalam pengelolaan keuangan desa agar masyarakat merasa puas atas kinerja para aktor tersebut. Ketika masyarakat sudah merasa puas dan terpenuhi kebutuhannya dalam kehidupan di desa, maka besar kemungkinan masyarakat akan mendukung para aktor untuk menjabat kembali di periode selanjutnya. Relasi antara aktor dan masyarakat menunjukkan bahwa para aktor dengan modal yang dimiliki berusaha mengendalikan masyarakat dan menjaga masyarakat agar tetap merasa puas dan memberikan dukungan kepada aktor. Hal ini sama dengan pengamatan yang dilakukan Bourdieu terhadap kehidupan profesor dan dosen muda di Fakultas Sastra bahwa profesor senior mengendalikan dosen calon profesor untuk tunduk dan patuh terhadapnya sekaligus menjaga agar dosen tersebut tidak kecewa dan pergi untuk mendukung profesor lain saingannya (Ritzer & Goodman, 2007).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan identifikasi aktor dan pengukuran pengaruh aktor yang telah dilakukan, terdapat enam aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa. Pada kasus di Desa Purwabakti, aktor lokal dominan tersebut adalah sekretaris desa (WY), bendahara desa (AS) dan TPK lapang kegiatan pembangunan (MF). Pada kasus di Desa Sukadamai, aktor lokal dominan tersebut adalah sekretaris desa (DK), bendahara desa (SJ) dan ketua LPM (MS).

Rata-rata indeks pengaruh tertinggi di Desa Purwabakti dimiliki oleh MF sebagai TPK lapang bidang pembangunan dengan kontribusi tertinggi berasal dari modal ekonomi. Sedangkan rata-rata indeks pengaruh tertinggi di Desa Sukadamai adalah DK sebagai sekretaris desa dengan kontribusi tertinggi berasal dari modal moral. Seluruh aktor tersebut memiliki strategi yang berbeda untuk mempertahankan posisinya dalam pengelolaan keuangan desa. Strategi tersebut tercermin dalam tindakan yang berbeda ketika mengatasi persoalan dalam pengelolaan keuangan desa. Perbedaan tindakan tersebut dipengaruhi oleh habitus aktor berupa pengalaman dan latar belakang aktor. Aktor lokal dominan yang berada di Desa Sukadamai dengan tipe “desa-kota” memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dan memiliki pengalaman berinteraksi dan bekerjasama dengan berbagai pihak luar desa, termasuk perguruan tinggi. Hal ini mendorong para aktor tersebut untuk bertindak dengan mengutamakan prinsip transparansi dan partisipatif agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Sedangkan aktor lokal dominan yang berada di Desa Purwabakti dengan tipe “desa-desa” memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah dan pengalaman bekerja sama dengan berbagai pihak luar desa yang lebih sedikit. Hal tersebut menyebabkan para aktor tersebut sangat ketat mengikuti peraturan pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga penyelesaian atas kendala berupa kekurangan dana untuk pembangunan desa dilakukan secara normatif dan praktis. Strategi dan tindakan yang dilakukan oleh para aktor tersebut dilakukan agar masyarakat merasa puas atas kinerja para aktor dan memperoleh dukungan dari masyarakat baik dalam menjabat periode saat ini ataupun untuk menjabat lagi di periode selanjutnya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada aparat pemerintah dan masyarakat di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai Kabupaten Bogor serta pihak-pihak lain yang telah mendukung penelitian ini.

Penelitian ini juga dapat terlaksana dengan bantuan pembiayaan dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek-BRIN) melalui skema Penelitian Tesis Magister (PTM) tahun anggaran 2020.

#### DAFTAR PUSTAKA (RUJUKAN)

- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In John & G. Richardson (Eds.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood Press.
- Bourdieu, P. (1993). *The Field of Cultural Production* (R. Johnson (ed.)). Columbia University Press.
- Bourdieu, P. (2005). *The Social Structures of The Economy*. Polity Press.
- Bourdieu, P. (2008a). *Key Concepts* (M. Grenfell (ed.)). Acumen.
- Bourdieu, P. (2008b). The Forms of Capital. In *Readings in Economic Sociology*. Routledge. <https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch15>
- Bourdieu, P. (2018). The forms of capital. In *The Sociology of Economic Life, Third Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780429494338>
- BPS Jabar. (2019). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019*. <https://jabar.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MDgzNzQyMTlhZjAzNDRmZmM5MTBlZmM4&xzmn=aHR0cHM6Ly9qYWJhcn5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOS8xMS8yOS8wODM3NDIxOWFmMDM0NGZmYzIxMGVmYzgv3RhdGlzdGlrdWtldWFuZ2FuLXBibWVyaW50YWgtZGFmFoLXByb3ZpbmNpLW>
- Bumulo, S., Adiwibowo, S., & Sjaf, S. (2018). The Dynamics of Land Tenure in Multi-ethnic Society. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3). <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i3.19395>
- Casey, K. L. (2008). Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory. *Critique: A Worldwide Student Journal of Politics, January 2005*, 1–25. [https://www.researchgate.net/profile/Kimberly\\_Casey2/publication/237710955\\_Defining\\_Political\\_Capital\\_A\\_Reconsideration\\_of\\_Bourdieu's\\_Interconvertibility\\_Theory/links/5b16bdda6fdcc6d3e04cb2b/Defining-Political-Capital-A-Reconsideration-of-Bourdieu-Inter](https://www.researchgate.net/profile/Kimberly_Casey2/publication/237710955_Defining_Political_Capital_A_Reconsideration_of_Bourdieu's_Interconvertibility_Theory/links/5b16bdda6fdcc6d3e04cb2b/Defining-Political-Capital-A-Reconsideration-of-Bourdieu-Inter)
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Suci, Handayani, Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., Hastowiyono, Suharyanto, & Kurniawan, B. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). [https://www.suryaden.com/sites/default/files//dokumen/buku\\_desa\\_membangun\\_indonesia\\_sutoro\\_eko.pdf](https://www.suryaden.com/sites/default/files//dokumen/buku_desa_membangun_indonesia_sutoro_eko.pdf)
- Kane, J. (2001). *The Politics of Moral Capital*. University Press, Cambridge. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490279>
- Kolopaking, L. M., Septianto, M., & Ambarita, E. (2019). The Synergy of Village Developing Management through Corporate Social Responsibility Activities. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(2), 102–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v7i2.26164>
- Lanjouw, P., Quizon, J., & Sparrow, R. (2001). Non-agricultural earnings in peri-urban areas of Tanzania: Evidence from household survey data. *Food Policy*, 26(4), 385–403. [https://doi.org/10.1016/S0306-9192\(01\)00010-0](https://doi.org/10.1016/S0306-9192(01)00010-0)
- Lin, N. (2001). *Social Capital: Structural Analysis in the Social Sciences*. Cambridge University.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336–352. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Neveu, E. (2018). Bourdieu's capital (s): Sociologizing an economic concept. In T. M. and J. J. Sallaz (Ed.), *The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu* (pp. 347–371). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199357192.013.15>
- Olii, R. R., Mahpudz, A., & Imran. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan pada Pilkada Kota Palu Tahun

2015. *Edu Civic Media Publikasi Prodi PPKN*, 6(1), 42–52. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/EduCivic/article/view/11201/8650>
- Ra'is, D. U. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. *Reformasi*, 7(1), 29–46. [jurnal.unitri.ac.id › article › download%0A](http://jurnal.unitri.ac.id/article/download/0A)
- Ritzer, G., & Douglas J. Goodman. (2007). *Teori Sosiologi Modern* (T. W. B. Santoso (ed.); 6th ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Sjaf, S. (2017). Kanalisasi politik etnik di makassar. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 92–97.
- Sjaf, S. (2019). *Involusi Republik Merdeka* (O. Al-Mustofa (ed.); 1st ed.). IPB Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). CV Alfabeta.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Ejurnal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 51–64.
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/16275/15778>
- Widhiastini, N. W., Subawa, N. S., Sedana, N., & Permatasari, N. P. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.1-11.2019>